

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Mengacu dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian lapangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebaran tingkat partisipasi pemilih dalam Pilwakot Medan tahun 2015 berdasarkan deskripsi atas wilayah tidak ada korelasi dengan keberadaan etnis secara mayoritas dengan tingkat partisipasi pemilih. Hal ini sebagaimana terlihat dari ekspos trend partisipasi atau tingkat kehadiran pemilih ke TPS pada Pilwako tahun 2015.
2. Kelompk etnis Cina merupakan kelompok etnik yang menunjukkan tingkat partisipasi rendah, menyusul etnis Melayu, Jawa, Mandailing dan Karo. Dengan demikian, semakin jelas bahwa sebaran tingkat partisipasi pemilih secara geogrrafis tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal kelompok etnis. Rendahnya tingkat partisipasi etnis Cina yang ada di Kecamatan Sunggal terlihat dari penjelasan informan pada saat diwawancarai. Di daerah ia tinggal mayoritas warganya adalah etns Cina, namun berdasarkan penuturannya tidak banyak etnis Cina yang memberikan hak pilihnya.
3. Selain tidak begitu mengenal secara baik calon nomor 1 dan calon nomor 2, ia lebih melihat pada kondisi nyata yang ada di tempat ia tinggal di mana pembangunan dan kebijakan pembangunanan yang ada tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh dirinya dan

keluarganya. Sehingga memilih dan tidak memilih calon walikota yang ada, tetap sama saja, nasib dan kehidupannya tidak juga berubah.

Secara umum hasil penelitian ini ingin menegaskan bahwa faktor sosial dan faktor budaya penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari aspek religi, etnik dan gender, serta pendidikan. Secara tematis, faktor sosial di sini meliputi aspek gender dan pendidikan. Sedangkan faktor budaya meliputi aspek etnik dan religi. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi adalah proses interaksi sosial, jarak sosial, informasi kepemiluan serta orientasi hubungan emosional antara pemilih dengan pasangan calon.

Penyaluran aspirasi politik dalam bentuk kultural seperti identitas etnik bukan merupakan isu signifikan pada praktik politik pemilihan langsung di Indonesia secara umum, dan di Kota Medan khususnya proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 yang lalu. Dimensi politik dan kultural adalah dua sisi dari sekeping koin praktik kehidupan, yang terpisah disebabkan kepentingan dan narasi historis yang berbeda; politik sebagai alat kekuasaan sedangkan kultural merupakan perangkat kehidupan, Kegagalan menjadikan aspek kultural (cultural mainstream) pada praktik politik pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan kegagalan sistem politik mengelola potensi kebudayaan sebagai modal kontestasi. Praktik politik demokrasi membutuhkan calon pemimpin yang dipilih secara langsung dan memiliki konektivitas erat dengan kebudayaan bukan pelekatan kebudayaan sesaat,

Keputusan memilih dan tidak memilih merupakan sebuah proses budaya (Svitaylo, 2012) dimana kombinasi orientasi kognitif (reason) dengan orientasi afektif (emotion) pada akhirnya melahirkan sebuah evaluasi terhadap kedua orientasi yakni kognisi dan afeksi. Hasil evaluasi inilah yang pada gilirannya melahirkan sebuah tindakan memilih atau tidak memilih.

Tindakan memilih dan tidak memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang lalu jelas dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Artinya faktor sosial budaya mempengaruhi tindakan pemilih dalam tingkatan kognisi dan afeksi, dengan catatan bahwa aspek sosial budaya adalah aspek yang dinamis. Dengan sifat dinamis dan lentur, faktor sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih, dimana pemilih melakukan kontrol dan umpan balik terhadap faktor sosial budaya dalam kaitan politik, kedekatan calon terhadap institusi dan praktek sosial budaya lainnya.

Konsepsi kebudayaan dalam dimensi politik Pilwako Kota Medan tahun 2015 dipergunakan untuk melihat realitas fenomena politik yang menarik aspek kultural sebagai bagian dari kontestasi politik pilkada yang selama ini dipraktikkan pada ranah kultural dengan aturan dan tata-cara tradisionil. Pada proses perkembangannya, politik pilkada secara eksplisit mempertemukan arus tradisionil dan modern pada suatu realitas hybrid. Aronoff dan Kubik (2013:198) menuliskan realitas kultural dilihat dari perspektif politik sebagai:

“there are two dominant strategies of its application. Some researchers, mostly in political science, propose a fixed definition of civil society and then they scan the changing historical realities to see where, when, and how various social arrangements merit to be subsumed under this concept. Others, usually found among anthropologists, sociologists, feminists, or critical scholars of culture, attempt to reconstruct the changing content of the concept, its ideological power, and the political consequences of its usage.”

Lebih lanjut, praktik politik yang mengikutsertakan dimensi kultural

merupakan celah yang terbuka bagi kebudayaan untuk melakukan proses secara alamiah melalui proses adaptasi dan strategi serta menempatkan kebudayaan pada bagian yang tepat dalam kehidupan masyarakat dan praktik politik itu sendiri. Aronoff dan Kubik (2013:200) melihat bahwa praktik kultural pada politik merupakan bagian kultural yang menitikberatkan pada persoalan masyarakat sipil (*civil society*) yang berkembang dan beradaptasi melalui kanal kultural terhadap aspek politik, dalam prosesnya kultural menjadi dimensi yang beradaptasi melalui proses pembentukan awal (*organize*), pengelolaan (*maintain*), mediasi dan membangun keseimbangan.

Kalangan yang memperlakukan kebudayaan sebagai warisan yang patut dilestarikan oleh masyarakat berasumsi bahwa kebudayaan merupakan basis pendefinisian identitas dan pembeda dari kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, dalam konteks ini identitas suatu kelompok atau etnisitas (kultural) merupakan fokus perhatian dalam melihat fenomena Pilwakot Kota Medan tahun 2015. Korelasi antara identitas dan kepentingan politik adalah suatu hubungan dalam satu keping yang saling bertolakbelakang namun memiliki keterkaitan pada tataran praktik politik praktis.

Identitas dalam pendapat Aronoff (Aronoff dan Kubik, 2013:189) adalah:

“in terms of an anachronistic national character approach that treats culture as if it is homogeneous for all groups within society—whereas it is always contested—and as static, rather than as dynamic.”

Keterhubungan antara identitas etnik, kultural dengan praktik politik adalah suatu hal yang lazim ditemukan pada praktik politik praktis; pemilihan kepala daerah dalam sistem pemilihan secara langsung, aspek kedekatan secara internal dan eksternal menjadi dimensi yang dipergunakan sebagai mobilitas politik, atau hal ini dilihat juga sebagai penerimaan manusia atas suatu kekuasaan, ketaatan dan respon yang diberikannya kepada suatu bentuk kepemimpinan, serta sifat-sifat kepemimpinan yang ditaatinya, dikuasai oleh suatu sikap hidup, berdasarkan suatu sistem nilai yang hidup dalam kebudayaannya.

Adapun bentuk-bentuk tingkah laku dan tata cara manusia melakukan interaksi dalam kehidupannya, tersimpul dalam aspek kelakuan dari kebudayaan. Wujud kebudayaan itu berakar menjangkau masa silam baik yang jauh maupun

yang dekat. Wujud kebudayaan sebagaimana mengacu pada Parson dan Kroeber meliputi hal hal yang bersifat tidak teraga (ide dan gagasan) dan teraga (tindakan) serta hasil karya (artefak). Adalah menjadi tugas tiap generasi untuk menjaga kesinambungan hidup dari wujud kebudayaan itu, terutama agar terpeliharanya keserasian, kebudayaan juga dilihat sebagai landasan atau dasar dalam mendefinisikan identitas suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya kebudayaan itu direproduksi pada praktik politik dan kehidupan keseharian untuk membentuk perilaku manusia yang taat akan aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku dalam struktur masyarakat.

Mengacu pada pendapat Foucault (2012), kekuasaan tidak terpusat pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintah serta para aparatur Negara, tetapi kekuasaan itu tersebar menyentuh ranah kehidupan masyarakat hingga skala mikro. Kekuasaan lebih diperlihatkan dalam taktik atau strategi, dari pada sebagai sumberdaya untuk dipakai. Dalam konteks inilah, pewacanaan hadir sebagai praktek politik. Pewacanaan akan nilai-nilai budaya lokal mengisyaratkan bekerjanya kekuasaan dalam membentuk dan mengatur perilaku individu. Aturan berdasarkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada dalam struktur masyarakat ini sebagai upaya dalam menciptakan tubuh yang patuh (*docile body*) para aktor yakni elit.

Pengetahuan akan nilai-nilai kebudayaan ini masih bertahan hingga saat ini karena adanya proses transformasi wacana tentang nilai-nilai kebudayaan dari masa ke masa, di mana tradisi seringkali ditemukan dalam kehidupan masyarakat, meski peristiwa berbeda terjadi seringkali dihubungkan dengan sejarah, pengetahuan akan sejarah menghegemoni kita untuk mematuhi norma-norma yang berlaku pada masa lalu. Tradisi memungkinkan kita mengisolasi “yang baru” di tengah-tengah latar sejarah yang telah permanen dan dapat memindahkan muatan-muatan yang terdapat di dalam “yang baru” tadi kepada orisinalitas, kelihaihan dan putusan beberapa individu tertentu yang melahirkan tradisi itu dulunya. Selanjutnya konsep mengenai pengaruh (*influence*) berkontribusi dalam memudahkan kita untuk menganalisa bagaimana proses penyebaran dan komunikasi. Pengaruh nilai-nilai kebudayaan ini dapat dilihat dari proses komunikasi dan perilaku individu terhadap individu lain.

Mengutip Escobar (Aronoff dan Kubik, 2013:214) yang mendeskripsikan transformasi kebudayaan sebagai:

“many ‘traditional cultures’ survive through their transformative engagement with modernity. ... If we continue to speak of tradition and modernity, it is because we continually fall into the trap of not saying anything new because the language does not permit it. The concept of hybrid cultures provides an opening toward the invention of new language.”

Konsep transformasi atas nilai-nilai kebudayaan ini dapat ditunjukkan dengan eksistensi kebudayaan ini dan bagaimana nilai-nilai ini tetap bertahan dalam struktur masyarakat seperti kemampuan adaptasi, inovasi, mempertahankan hubungan-hubungan antar elemen-elemen berbeda, sistem asimilasi dan pertukaran yang ada.

## **5.2. Saran**

1. Sebaran tingkat partisipasi yang berbeda diberbagai wilayah kecamatan yang ada tidak berkorelasi dengan komposisi etnik yang ada. Hal ini mengingat tidak semua wilayah kecamatan maupun kelurahan memiliki data etnik yang lengkap. Untuk itu penting bagi KPU memasukkan elemen data etnik di dalam proses pendataan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang realitas etnik yang ada di masing masing wilayah secara akurat. Selain itu, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara KPU , tapi juga oleh semua pihak terutama pasangan calon yang akan berkontestasi. Ini penting mengingat banyak pemilih yang belum atau tidak mengenal secara baik calon atau partai pendukung pasangan calon.
2. Rendahnya tingkat partisipasi pada beberapa kelompok etnik seperti kelompok etnis Cina, Melayu, Jawa , Batak Mandailing, dan Karo menunjukkan perlu adanya pendekatan secara kultural baik oleh penyelenggara maupun kalangan partai politik terhadap pemilih dengan latar belakang etnik yang beragam.

3. Terkait faktor sosial budaya dan faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi karena kurangnya sosialisasi oleh calon serta kedekatan hubungan baik secara social, emosional dan kultural yang tidak dipergunakan secara maksimal oleh para calon, sehingga pemilih cenderung bersifat rasional. Selain itu tidak adanya manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh pemilih baik secara ekonomi, sosial maupun politis serta tidak adanya perubahan dalam fasilitas pelayanan dan infra struktur yang ada membuat masyarakat enggan untuk memberikan hak pilihnya. Sebagai saran maka perlu diperkuat institusi maupun pranata sosial yang ada di masyarakat sehingga mampu menjadi modal sosial sekaligus modal politik bagi para calon dan partai politik untuk memanfaatkan. Selain itu masyarakat juga perlu mengenal lebih baik calon yang akan mereka pilih sebagai pemimpin. Oleh karenanya, penting bagi para kontestan membangun hubungan yang bersifat emosional kepada masyarakat khususnya para pemilih. Karena keputusan pemilih (voters) untuk memilih dan tidak memilih merupakan kombinasi dari aspek kognitif (rasional) dan aspek afektif (emosional).